

BAB V.

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Setelah penelitian ini dilakukan secara mix method yakni dengan kuantitatif melalui penyebaran kuesioner berupa angket serta secara kualitatif berupa wawancara kepada narasumber yang dalam ini mahasiswa UPNVJ yang berada di lima wilayah DKI Jakarta yaitu Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, dan Jakarta Pusat, maka hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Prinsip transparansi sangat penting dalam pelayanan administratif publik. Dalam konteks pengisian kekosongan jabatan oleh Pejabat Gubernur, kejelasan mengenai identitas, rekam jejak, dan proses penunjukan menjadi hal penting. Penelitian menunjukkan bahwa transparansi dalam pengisian jabatan ini berpengaruh terhadap pandangan responden mahasiswa UPNVJ. Data kuantitatif dan kualitatif menyatakan bahwa pengisian jabatan oleh PJ Gubernur DKI Jakarta yang telah dilaksanakan belum memenuhi prinsip transparansi dan demokratis. Kritik terhadap kurangnya partisipasi masyarakat dalam memberikan saran dan masukan juga disampaikan. Namun, ada pandangan bahwa pengusulan PJ Gubernur oleh Kemendagri dan DPRD DKI Jakarta dianggap tepat sebagai perwakilan rakyat. Perbaikan transparansi dan melibatkan partisipasi publik dapat meningkatkan legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
2. Prinsip akuntabilitas dalam pengisian kekosongan jabatan oleh PJ Gubernur DKI Jakarta memiliki pengaruh terhadap pandangan mahasiswa UPNVJ. Data kuantitatif menunjukkan keraguan terhadap implementasi prinsip akuntabilitas dan good governance dalam pengisian jabatan tersebut, kemudian hal tersebut didukung oleh data kualitatif bahwa prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan pengisian

kekosongan oleh PJ Gubernur belum sepenuhnya terpenuhi. Mengenai ketersetujuan mereka terkait kekosongan diisi oleh PJ mereka berpendapat bahwa kehadiran PJ Gubernur dianggap penting untuk menjaga kelancaran pemerintahan dan menghindari kekacauan administratif dalam pelayanan publik. Implementasi prinsip akuntabilitas dalam pengisian jabatan perlu diperhatikan lebih lanjut.

3. Prinsip keterbukaan informasi publik dalam pengisian kekosongan jabatan oleh PJ Gubernur DKI Jakarta berpengaruh terhadap pandangan mahasiswa UPNVJ. Penelitian kuantitatif menunjukkan bahwa sebagian responden mengatakan bahwa tidak adanya ketersediaan tempat bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, kurangnya keterbukaan informasi, dan tidak adanya laporan kepada masyarakat dalam proses pengisian jabatan tersebut. Studi kualitatif mengkonfirmasi bahwa keterbukaan informasi masih kurang, dan seharusnya informasi mengenai PJ Gubernur diinformasikan secara merata melalui media elektronik dan cetak. Keterbukaan informasi publik dinilai penting untuk menjaga pengawasan, integritas, objektivitas, kepercayaan, integritas, dan akuntabilitas pemerintahan. Dalam pengambilan keputusan, melibatkan masyarakat, dan memberikan ruang bagi saran dan kritik, keterbukaan informasi akan mendorong sistem pemerintahan yang lebih transparan, bertanggung jawab, dan mampu melayani kepentingan publik dengan lebih baik. Data kuantitatif dan kualitatif saling mendukung, menunjukkan perlunya peningkatan keterbukaan informasi dalam pengisian jabatan penjabat gubernur.
4. Prinsip aturan hukum dalam pengisian kekosongan jabatan oleh PJ Gubernur DKI Jakarta berpengaruh terhadap pandangan mahasiswa UPNVJ. Penelitian kuantitatif menunjukkan bahwa sebagian besar responden setuju bahwa pengisian jabatan oleh PJ Gubernur telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Studi kualitatif mengkonfirmasi bahwa pengisian kekosongan jabatan oleh PJ Gubernur telah sesuai dengan

undang-undang tersebut. Kesesuaian tersebut menjadi pilihan yang tepat dibandingkan Plt, karena kedua jabatan sementara tersebut memiliki tupoksi dan keterbatasan kewenangan yang berbeda. Narasumber menyatakan bahwa PJ Gubernur memiliki hak, kewajiban, dan larangan yang diatur dalam undang-undang, serta wewenang untuk mengadopsi dan meneruskan kebijakan Gubernur sebelumnya. Data kuantitatif dan kualitatif saling mendukung, menunjukkan bahwa pengisian kekosongan jabatan oleh PJ Gubernur telah sesuai dengan aturan hukum, sehingga PJ Gubernur memiliki peran dan tanggung jawab yang sama dengan Gubernur, namun tetap mematuhi batasan dan larangan yang berlaku.

5. Pandangan responden mahasiswa UPNVJ terkait dengan pengisian kekosongan jabatan Gubernur oleh Penjabat (PJ) memberikan perspektif yang menarik dan berbeda dengan mengutamakan prinsip demokrasi, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Penelitian kuantitatif menunjukkan bahwa mayoritas responden setuju bahwa PJ Gubernur penting dalam mengisi kekosongan jabatan dan dapat melanjutkan atau membuat kebijakan baru. Mahasiswa juga berpandangan agar fokus kebijakan mencakup sektor perekonomian dan tata kelola ruang kota. Studi kualitatif mengkonfirmasi bahwa mahasiswa menunjukkan dukungan terhadap pengisian kekosongan jabatan oleh PJ Gubernur untuk menjaga kelancaran pemerintahan daerah. Pandangan responden mahasiswa dapat dipengaruhi oleh kinerja PJ dalam menjalankan tugasnya. Mahasiswa melihat PJ Gubernur sebagai peluang untuk membawa ide segar dan merespons dinamika sosial, ekonomi, dan politik di daerah. Hasil dari penelitian kuantitatif dan data kualitatif saling mendukung, menunjukkan konsistensi dalam pandangan mahasiswa UPNVJ terkait dengan harapan dan ekspektasi terhadap PJ Gubernur terpilih dalam mencapai pembangunan berkelanjutan, responsif terhadap tuntutan masyarakat, dan efektif dalam mencapai tujuan pembangunan daerah.

V.2 Saran

1. Dalam proses penunjukan pejabat kepala daerah khususnya pejabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, pastikan proses pengisian dilakukan secara transparan dan melibatkan partisipasi publik yang lebih luas baik melalui DPRD sebagai dewan perwakilan rakyat ataupun secara langsung. Informasikan kepada masyarakat mengenai proses seleksi, kriteria penilaian, dan tahapan yang akan dilalui. Dengan melibatkan publik, keputusan yang diambil akan lebih dipercaya dan diterima dengan baik. Seperti mengadakan sesi wawancara atau diskusi terbuka dengan masyarakat untuk mendapatkan masukan dan pemahaman yang lebih baik mengenai calon yang bersangkutan. Hal ini dapat membantu memperoleh perspektif yang beragam dan membangun kepercayaan antara Pejabat dan masyarakat.
2. Proses seleksi perlu dilakukan secara kompetitif untuk menentukan calon yang paling berkualifikasi dan memenuhi syarat. Buat komite seleksi yang terdiri dari berbagai pihak yang berkompeten dan objektif untuk mengevaluasi calon-calon potensial. Proses seleksi yang ketat akan memastikan bahwa Pejabat yang dipilih memiliki kapabilitas dan integritas yang tinggi.
3. Bagi pejabat Gubernur yang terpilih penting untuk menunjukkan independensi dan netralitas dalam menjalankan tugasnya. Pejabat Gubernur ini harus dipastikan tidak memiliki afiliasi politik atau kepentingan pribadi yang dapat mempengaruhi keputusan-keputusan yang diambil selama masa jabatannya. Selain itu Pejabat Gubernur DKI Jakarta harus menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pelayanan publik. Hal ini dapat dilihat dari pemilihan Pejabat yang memiliki rekam jejak yang baik dalam memimpin dan memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Karena seorang kepala daerah yang baik harus mampu memahami kebutuhan masyarakat dan berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.
4. Dalam melaksanakan tugas nya Pejabat Gubernur Pejabat harus memiliki pemahaman yang baik tentang program dan kebijakan yang telah

dilaksanakan sebelumnya, serta memiliki visi yang jelas untuk memajukan daerah tersebut. Selain itu, perlu adanya mekanisme pelaporan yang efektif agar Pejabat dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada pihak yang berwenang dan masyarakat. Serta perlu dilakukannya evaluasi kinerja secara berkala terhadap Pejabat untuk memastikan bahwa tugas-tugasnya dilaksanakan dengan baik. Evaluasi ini bisa membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang perlu diperbaiki serta memberikan umpan balik yang berguna untuk pengembangan masa depan.